



Kalbar Tidak Masuk Provinsi Terkorup

- Opini BPK Tak Menjamin Bebas Korupsi
- Pola Penilaian BPK Harus Dievaluasi

PONTIANAK - Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai cukup bebas dari tindak pidana korupsi. Hal itu bisa dilihat dari daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak tahun 2004-2019 versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Ketua KPK Agus Rahardjo membeberkan daftar provinsi tersebut saat *public hearing* atas rencana revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemi-

lian Kepala Daerah, Kamis (7/11). Adapun lima provinsi teratas terkorup yakni Jawa Timur dengan 85 kasus, Jawa Barat 84 kasus, Sumatera Utara 60 kasus, DKI Jakarta 59 kasus dan Riau 45 kasus. Kalbar tidak masuk dari 25 provinsi terkorup yang dirilis.

Hal ini mendapat respon positif dari beberapa pengamat. Akademisi Untan, Eddy Suratman menilai hal tersebut merupakan



Eddy Suratman

◆ Ke Halaman 7 kolom 5



Kalbar Tidak Masuk Provinsi Terkorup

Sambungan dari halaman 1

kabar baik. Kalbar harus bersyukur bahwa kasus korupsi di provinsi ini memang tidak banyak.

"Itu kan faktornya dilihat dari seberapa banyak pejabat yang terkena kasus korupsi. Kebetulan dalam pengamatan saya, tiga tahun terakhir tidak banyak kasus, terutama di 2018-2019," ungkapnya kepada Pontianak Post, Minggu (10/11).

Eddy mengatakan, hal ini bukan berarti karena KPK tidak memberikan perhatian lebih dalam penanganan kasus korupsi di Kalbar. Lembaga antirasuah itu dipastikan sudah memberikan bobot yang sama untuk semua provinsi di Indonesia. Jika tidak, KPK tentu tidak akan mengungkap daftar 25 provinsi terkorup tersebut.

"KPK kalau sudah mengungkap itu pasti sudah memberi bobot sama ke semua daerah. Jika tidak, dia (KPK) tidak bisa mengumumkan seperti itu," katanya. Artinya, pemerintahan di Kalbar memang dinilai sudah cukup baik dalam pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam periode setahun terakhir.

Lantas, bagaimana hubungan antara status provinsi terkorup itu dengan hasil audit BPK? Seperti diketahui, Laporan Keuangan Pemprov Kalbar tahun 2018 tidak mendapat opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*. Pemprov hanya meraih opini *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)*. Menurut Edy, baiknya opini BPK tidak identik dengan bebas dari korupsi. Begitu pula sebaliknya. "WTP itu, sudah sejak lama saya sampaikan, tidak selalu terkait dengan kasus korupsi," ucapnya.

Eddy lantas menganalogikan opini WTP dengan pemeriksaan kesehatan manusia. Meski dalam tes kesehatan diketahui bahwa kondisi kolesterol, tekanan darah dan ginjal seseorang normal, itu tidak menjamin orang tersebut bebas dari penyakit. "WTP kan secara umum artinya pengelolaan keuangannya bagus, tapi bukan berarti tidak ada korupsi. Kalbar kan (cuma) WDP, artinya WTP itu tidak jaminan," tambahnya.

Terbukti, Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur yang meraih WTP justru termasuk dalam lima besar provinsi terkorup. Karena itu, ia menilai hal ini harus menjadi bahan introspeksi dan evaluasi bagi BPK.

"Ini proses introspeksi, sudah benarkah opini yang diberikan. Ada tidak metodologi lain? Jangan-jangan ini kebiasaan yang terus-menerus. Mungkin perlu diubah pola pemeriksaannya (BPK)," saran Eddy.

Ia berpendapat, yang penting untuk ditonjolkan ke depan bukan hanya pada pemeriksaan keuangan melainkan kinerja. Eddy menyebutkan BPK memiliki tiga tugas utama. Pertama, pemeriksaan keuangan dengan hasil opini. Kedua, pemeriksaan kinerja keuangan yakni pemanfaatan uang yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu di mana hasilnya digunakan untuk proses hukum.

"Sekarang tampak buktinya. Mari jadikan ini pelajaran. Jangan-jangan metodenya perlu diubah, jangan-jangan (pemeriksaan) keuangan tidak perlu ditonjolkan, tapi lebih ke pemeriksaan kinerja," pungkasnya.

Pendapat serupa diungkapkan Pengamat Politik Untan, Jumadi. Idealnya, kata dia, harus ada korelasi antara WTP dengan persentase tingkat korupsi di daerah. Dalam banyak kasus, daerah yang meraih WTP tidak otomatis bebas korupsi. Hal tersebut dinilai telah mencoreng nama pemeriksa keuangan, sebab sebagian besar provinsi terkorup justru meraih WTP.

Kondisi ini terjadi karena pemeriksaan BPK lebih kepada standar akuntansi terkait fungsi pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Muaranya adalah transparansi dan akuntabel.

Namun, jika melihat pada temuan KPK, dari 25 provinsi terkorup itu, 60 persen lebih kasusnya pada perkara tindak pidana suap. Suap diberikan pihak swasta kepada penyelenggara negara atau suap penyelenggara negara kepada penyelenggara negara yang lebih tinggi. Kemudian, kasus lain yang menonjol yakni tindak pidana pengadaan barang dan jasa, serta tindak pidana penyalahgunaan anggaran.

"Tentu ini menjadi catatan bagi BPK. Semestinya yang WTP ada korelasinya. Contoh Kalbar WDP tapi tidak masuk terkorup. Ini catatan bagi BPK," pesannya.

Ia berpendapat mungkin perlu perubahan dalam manajemen pemeriksaan BPK. Polemik terkait WDP yang diraih Pemprov Kalbar beberapa waktu lalu, bisa menjadi catatan untuk melakukan koreksi. "Unsur objektivitas penting. Perlu evaluasi indikator laporan WTP itu berkorelasi dengan tingkat korupsi, kalau (korupsi) masih tinggi itu akan jadi pertanyaan publik," tutupnya. (**bar**)